

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Idealnya pendidikan yang dibangun bangsa merujuk pada Tujuan Pendidikan Nasional yang termuat dalam Pasal 3 undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan watak agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang baik.

Namun tujuan dari pendidikan belum dapat terealisasi dengan baik dikarenakan banyak peristiwa kemerosotan moral yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya anak-anak maupun remaja. Kemerosotan moral pada kalangan remaja berkaitan dengan ketidakpastian, ketidaktentuan, serta godaan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik hal ini dikarenakan pada masa ini remaja mengalami masa transisi (Ningrum, 2015). Lebih lanjut lagi menurut Sumara et al., (2017) menyatakan Kemerosotan moral berkaitan dengan kenakalan remaja seperti perkelahian, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, penjangbretan, dan kasus kehamilan diluar pernikahan. Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa kemerosotan moral yang terjadi di kalangan remaja adalah perbuatan yang tidak baik yang dikarenakan godaan atas pilihan bagaimana bertingkah laku. Kemerosotan moral yang dilakukan oleh remaja seringkali merugikan dirinya sendiri, lingkungan keluarga bahkan lingkungan masyarakat.

Kenakalan remaja merupakan semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang dilakukan remaja (Syifaunnufush & Diana, 2017). Lebih lanjut lagi Aroma & Suminar (2012) menyatakan bahwa kriminal remaja disebut sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangannya. Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja terjadi karena remaja itu sendiri tidak dapat memenuhi tugas dalam perkembangannya sehingga terjadi penyimpangan dari norma-norma. Penyimpangan yang dilakukan oleh remaja biasanya dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan remaja itu sendiri.

Kenakalan remaja adalah masalah yang kompleks yang merugikan masyarakat (Mulvey et al., 1993). Lebih lanjut lagi Meldrum et al., (2016) menyebutkan bahwa kenakalan remaja yang pengendalian dirinya rendah akan cenderung mengarah kedalam kejahatan. Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa kenakalan remaja yang mengarah kedalam kejahatan akan lebih beresiko merugikan masyarakat. Oleh karena itu remaja seharusnya memiliki pengendalian diri yang baik agar tidak merugikan masyarakat pada umumnya maupun dirinya secara khusus.

Masalah kemerosotan moral diangkat menjadi kajian dalam penelitian ini, dikarenakan walaupun negara Indonesia memiliki tujuan pendidikan yang isinya menjadikan manusia yang memiliki akhlak yang baik, namun pada kenyataan masih bertolak belakang dengan tujuan pendidikan. Salah satu contoh dari kemerosotan moral yang terjadi di Indonesia khususnya pada kalangan remaja yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain dilansir dari liputan6.com yang memberitakan tentang 3 pelajar SMA yang menganiaya guru. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter pada diri anak bangsa kini telah menurun. Degradasi moral ini menunjukkan bahwa tujuan dari pendidikan yang menjadikan manusia berakhlak itu belum sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Tindakan diatas merupakan salah satu peristiwa kemerosotan moral yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya anak-anak maupun remaja. Thomas Lickona mengungkapkan:

Ada sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang di maksud adalah (1) meningkatnya kekerasan dikalangan remaja; (2) penggunaan bahasa dan

kata-kata yang memburuk; (3) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindakan kekerasan; (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas; (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; (6) menurunnya etos kerja; (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara; (9) membudayakan ketidakjujuran; dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. (Muslich, 2013:35)

Kesepuluh tanda zaman tersebut sudah ada di Indonesia. Kemerosotan moral biasanya melalui kekerasan yang berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Adapun kekerasan fisik yang bisa menyebabkan cedera fisik atau matinya orang lain seperti menabrakan badan dengan sengaja, mencubit, memukul, menoyor, menampar, menendang. Bahkan mempermalukan siswa dengan meminta siswa untuk menggunakan atribut yang tidak lazim merupakan suatu cedera psikis.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tindakan kriminalitas yang melibatkan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tahun 2011 sampai tahun 2018, tercatat sejumlah 11.116 anak terlibat dalam kasus kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan seperti kejahatan jalan, pencurian, begal, geng motor, pembunuhan paling mendominasi. Adapun jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan dari tahun 2011 mencapai 695 orang, di tahun 2018 jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan meningkat menjadi 1.434 orang. Pada semester awal pada tahun 2018 sejumlah remaja berhadapan dengan hukum adapun kasus-kasus yang terjadi adalah narkoba, serta tindakan asusila dan selama Januari sampai April 2019 kasus yang banyak terjadi yaitu mengenai perundungan (*bullying*), tindak kekerasan, tindak asusila, dan tawuran pelajar.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak remaja masih sangat tinggi. Oleh karena itu butuh penanganan yang serius dari pemerintah untuk menangani permasalahan kemerosotan moral di lingkungan remaja. Pemerintah bertanggung jawab akan hal ini karena didalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa pemerintah

memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan akhlak mulia peserta didik demi tercapainya tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah merupakan wadah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 pasal 31 ayat (3). Dalam hal ini sekolah adalah wadah pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik, sekolah juga tidak hanya tempat mentransfer ilmu melainkan harus menanamkan karakter positif pada peserta didik. Pendidikan yang merupakan *agent of change* harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa kita. Karena itu, pendidikan kita perlu direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan memiliki karakter atau akhlak mulia. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu mengemban pembentukan karakter (*character building*) sehingga para peserta didik dan para lulusannya dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di masa-masa mendatang tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia. Untuk mencapai hal tersebut khususnya di bidang pembentukan watak dan peradaban yang bermartabat serta ahlak yang mulai perlu dikembangkan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter baik yang berlandaskan kebajikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Kebajikan adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan yang baik menurut sudut pandang moral universal (Saptono, 2011:20). Dengan demikian kebajikan perlu dimiliki oleh setiap individu untuk mengembangkan karakternya, sehingga terwujudnya individu yang berkualitas baik.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan melalui sekolah dalam mengatasi degradasi moral yang terjadi yaitu; dalam penelitian Isnaini (2013) juga menyebutkan indikator lain mengenai rusaknya anak bangsa bisa diamati dari memudarnya sopan santun siswa, yaitu dapat dilihat dari mereka berbicara terhadap sesama, terhadap guru bahkan orang tuanya, kata-kata kotor yang sepatutnya tidak diucapkan seringkali terlontar, sifat tidak jujur, serta akhlak mulia yang sulit ditemui pada diri anak. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti tersebut adalah untuk memperbaiki karakter anak bisa melalui sekolah madrasah. Penelitian dari Sri Cahyati (2017) menggunakan pendekatan kualitatif,

merumuskan rumusan masalah dengan tiga pertanyaan, yaitu Bagaimana konsep *TCB* (*Taqwa Character Building*) dalam mengembangkan keadaban kewarganegaraan (*Civic Virtue*) siswa?; Bagaimana pengintegrasian nilai-nilai *TCB* dalam pengembangan budaya sekolah?; Bagaimana pola interaksi siswa dilingkungan SMP Darul Hikam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini memiliki hasil menciptakan karakter baik yang beradab, maka biasakanlah penanaman nilai –nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Suatu sikap dan nilai karakter dilakukan secara terus-menerus di sekolah maka akan membentuk budaya sekolah yang berkarakter. Menciptakan warganegara yang berkarakter melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai instrument pembentukan karakter warga Negara harus menampakkan wujud dalam standarisasi karakter warga Negara. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa peneliti menawarkan solusi agar karakter buruk peserta didik dapat diminimalisir dengan kebiasaan baik yang dimulai dari lingkungan sekolah hingga berdampak baik di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan degradasi moral yang terjadi di Kota Bandung peneliti menawarkan solusi melalui Gerakan Bandung Santun dalam memperbaiki dan meminimalisir degradasi moral karakter peserta didik. Adapaun tujuan khusus dari Gerakan Bandung Santun (2018) Adalah :

- 1) Membiasakan santun dalam berkomunikasi sehari-hari, termasuk dalam komunikasi di media sosial
- 2) Membiasakan diri mengucapkan kata : tolong, maaf, terima kasih, dan selamat (punten, hatur nuhun, wilujeng)
- 3) Setiap warga kota bandung menjadi pelopor kesantunan dan menjadi pelapor bila menemukan perilaku ketidaksantunan di lingkungannya.

Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa Gerakan Bandung Santun bertujuan membentuk warga kota bandung yang beretika, berestetika, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, mampu mengapresiasi, rendah hati yang dilandasi iman dan takwa berdasarkan Pancasila.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mayoritas penduduknya di tatar Sunda, pendidikan karakter sangat diperlukan mengingat

perubahan dan degradasi akhlak serta moral generasi muda yang kian mengkhawatirkan. Sering munculnya ungkapan kata-kata kasar dan jorok di lingkungan warga Bandung menjadi keresahan dan kekhawatiran kita semua sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena itu, sudah saatnya ada upaya untuk mengikis kebiasaan tersebut melalui suatu tindakan nyata.

Kajian kemerosotan moral diangkat menjadi kajian didalam penelitian ini dikarenakan PKn sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius serta memiliki karakteristik yang multi dimensional. Hal ini dikarenakan pertama, PKn sebagai suatu kajian mengenai “*Civic Virtue*” dan “*Civic Culture*” yang menjadi landasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dan gerakan sosial budaya kewarganegaraan. Kedua, PKn sebagai program kurikuler memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius baik dalam latar pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian siswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, PKn sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “*Civic Virtue*” dan “*Civic Culture*” melalui partisipatif aktif secara cerdas, demokratis, dan religius dalam lingkungannya (Winataputra,1999)

Civic virtue diartikan sebagai kemauan untuk mendahulukan kepentingan publik (Winarno, 2009:11). Kata *virtue* tidak mengacu kepada hanya satu atau dua karakter spesifik yang sepantasnya dilakukan. Tetapi bertalian dengan keseluruhan pola pikir yang mendasari seluruh dan segala macam tindakan, emosi, pilihan reaksi, persepsi, sikap, hasrat, harapan, kepentingan, dan sensibilitas. Konsep *Virtue* adalah konsep yang mengidentifikasi seseorang secara moral dianggap baik. Nilai-nilai kebajikan meliputi kejujuran, kesetiaan, kehormatan, dan kebesaran hati yang merupakan norma individual yang hebat yang dapat dijadikan model atau pedoman bagi moral setiap orang (Kalidjernih, 2009:79). Dengan demikian seseorang dikatakan memiliki moral yang baik adalah orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, kesetiaan,

kehormatan dan kebesaran hati. Dan keempat nilai tersebut harus dimiliki setiap warga negara agar terciptanya *good citizenship*.

Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*), bahwa ontologi nilai dari kajian Pkn yakni keadaban/kebajikan dengan syarat bahwa keadaban/kebajikan itu ditanamkan oleh warga negara kepada sesamanya dengan tanpa pamrih. Dasar tanpa pamrih adalah keikhlasan, tidak minta balas budi, balas jasa, *this is not bisnis*, tetapi amal kebajikan (*virtue*) (Wahab & Sapriya 2011). Dimana tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan esensi utama dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*). Masyarakat madani Indonesia yang baik adalah yang memiliki ketaqwaan, jaminan hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi yang luas dari warga negara dalam pengambilan keputusan public didalam berbagai tingkatan, dan pelaksanaan Pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik (Winataputra dan Budimansyah, 2012). Dalam konteks penelitian ini, keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) merupakan bagian dari Pkn untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizenship*).

Keberadaan *civic virtue* menjadi penting untuk menciptakan negara demokrasi yang memiliki kehidupan yang demokratis. Fokus utama *civic virtue* yang menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi diperkuat oleh pemikiran Nicollo Machiavelli yang mengatakan bahwa negara yang baik yaitu dimana warga negaranya terlibat aktif didalam pandangan politik dan memahami bahwa satu-satunya cara untuk memiliki warga negara yang otentik adalah dengan menempatkan kebaikan Bersama diatas kepentingan pribadi (Matei, 2011).

Kebajikan sipil atau *civic virtue* menurut Machiavelli memiliki banyak arti. Hal ini bisa berupa keberanian, ketabahan, keterampilan, semangat kewarganegaraan, dan lainnya. Karakter-karakter tersebut dapat diberikan melalui suatu pendidikan dengan tujuan membentuk warga negara yang ideal. Konsep *civic virtue* Machiavelli rupanya juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor

87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pasal 3 yang berbunyi “PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab”.

Ada kesamaan konsep *civic virtue* Machiavelli dan Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 3, yaitu keduanya bertujuan untuk membentuk warga yang ideal dengan memiliki karakter yang demokratis, berani, peduli sosial dan mempunyai semangat. Karakter-karakter tersebut dapat diberikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang berupaya membentuk warga negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, kehidupan demokrasi akan berjalan dengan baik secara terus-menerus seiring dengan munculnya sikap-sikap demokratis warga negara.

Melalui pemaparan diatas, sangatlah jelas bahwa pembinaan dan pengembangan *civic virtue* merupakan satu diantara pendidikan yang harus diberikan kepada warga negara khususnya generasi muda. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkualitas dilihat dari baik buruknya kualitas warga Negaranya. Pengembangan *civic virtue* tidak hanya pendidikan formal di dalam kelas saja yang difokuskan tetapi juga bisa dilihat dari pendidikan diluar kelas. Kurikulum 2013 dianggap dapat menjadi solusi berbagai keluhan anak didik terhadap situasi pendidikan yang terjadi sekarang. Dilihat dari tujuannya sudah jelas bahwa Program Pendidikan Karakter Gerakan Bandung Santun dapat membina keadaban kewarganegaraan untuk menjadikan anak-anak menjadi warga Negara yang berkualitas. Dengan demikian peneliti terdorong mengkaji dan menganalisis **Program Pendidikan Karakter Gerakan Bandung Santun. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter melalui Gerakan Bandung Santun dalam membina Keadaban Kewarganegaraan (Studi Kasus di SMP Negeri 51 Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa pertanyaan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Gerakan Bandung Santun dalam membina Keadaban Kewarganegaraan (*civic virtue*) di SMP Negeri 51 Bandung?
2. Bagaimana implementasi kebijakan sekolah dalam menerapkan Gerakan Bandung Santun dalam membina *civic virtue* di SMP Negeri 51 Bandung?
3. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Gerakan Bandung Santun untuk membina *civic virtue* di SMP Negeri 51 Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai “Penguatan Pendidikan Karakter melalui Gerakan Bandung Santun dalam Membina Keadaban Kewarganegaraan”

b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Perencanaan Gerakan Bandung Santun dalam membina Keadaban Kewarganegaraan (*civic virtue*) di SMP Negeri 51 Bandung.
2. Implementasi kebijakan sekolah dalam menerapkan Gerakan Bandung Santun di SMP Negeri 51 Bandung.
3. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Gerakan Bandung Santun di SMP Negeri 51 Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

1.1.1 Segi Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tataran teoritis bidang pendidikan kewarganegaraan khususnya kajian tentang

Pendidikan Kewarganegaraan domain kurikuler. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pembinaan karakter warga negara di lingkungan sekolah melalui Gerakan Bandung Santun dalam membina *civic virtue* yang relevan dengan tujuan PKn yaitu *To be Smart and Good Citizenship*.

1.1.2 Segi Kebijakan

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada pemerintah khususnya dalam ranah pendidikan agar mengaktualisasikan perannya dalam mewujudkan pendidikan berbasis karakter untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bermoral.

1.4.3 Segi Praktik

1. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan dan pedoman ketika mahasiswa sudah bekerja sebagai guru di lingkungan sekolah.
2. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini menjadi salah satu dorongan untuk lebih menghidupkan peran mahasiswa ataupun dosen untuk turut terlibat dalam mewujudkan penguatan pendidikan karakter di sekolah demi terciptanya lingkungan sekolah yang menciptakan *To be Smart and Good Citizenship*.
3. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memperkuat ranah aktualisasi perguruan tinggi yang lebih implementatif dan menjadikan gerakan bandung santun ini sebagai pendidikan karakter sekolah.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memperkuat strategi menyusun kebijakan-kebijakan untuk turut pula melibatkan unsur masyarakat dalam mewujudkan pendidikan karakter di sekolah.
5. Bagi Pembaca, penelitian ini menjadi salah satu referensi untuk mengetahui penguatan pendidikan karakter melalui gerakan bandung santun dalam membina keadaban kewarganegaraan.

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara langsung untuk mengatasi kemerosotan moral melalui Gerakan Bandung Santun dalam membina

keadaban warga negara sehingga warga negara menjadi *To be Smart and Good Citizenship*.

1.5 Struktur Penelitian Tesis

Pada bagian ini, penulis memberikan struktur penelitian secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian yang berkaitan dengan Penguatan Pendidikan Karakter melalui Gerakan Bandung Santun dalam membina keadaban kewarganegaraan. Secara berurutan penelitian ini direncanakan menjadi lima bab. Tiap bab menjabarkan penjelasan yang mendalam. Bagian dari bab tersebut antara lain:

1.5.1 BAB I

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dalam latar belakang permasalahan yang akan diteliti dan disertai dengan data sehingga permasalahan ini layak untuk diteliti. Rumusan masalah, dalam rumusan masalah ini penulis membuat 3 rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat dengan tujuan agar penelitian memiliki fokus yang lebih terarah dan berfokus. Tujuan penelitian, dalam tujuan penelitian terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitain, dalam manfaat penelitian tesis penulis memberikan gambaran bagaimana tesis ini memberikan kebermanfaatannya secara teoritis, praktis, segi kebijakan, dan isu sosial.

1.5.2 BAB II

Bab dua berupa landasan teori yang mengkaji tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian tesis yang terdiri dari kajian teori, teori yang digunakan disesuaikan dengan kajian dalam tesis dan digunakan dalam pembahasan permasalahan yang dirujuk menggunakan berbagai macam sumber yang sesuai. Landasan teori mengkaji tentang konsep-konsep, teori-teori, serta memakai penelitian terdahulu sehingga menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu, penelitian terdahulu yang dikaji oleh peneliti lain dijadikan dasar asumsi peneliti untuk memperkaya dan membandingkan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

1.5.3 BAB III

Bab tiga berupa metodologi penelitian yang membahas mengenai metodologi penelitian yang memberikan arahan serta gambaran kepada peneliti. Dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisis data penulis menggunakan pendekatan-pendekatan dan juga metodologi penelitian.

1.5.4 BAB IV

Bab empat berupa temuan dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian, dari hasil data sesuai apa yang di dapatkan di lapangan. Pembahasan hasil penelitian melakukan analisis serta membahasnya dengan menggunakan teori-teori yang ada serta dikaji pula dengan data-data yang mendukung dalam penelitian dari analisis pembahasan dan teori yang berupa pemecahan masalah secara konkret.

1.5.5 BAB V

Bab lima ini berisikan simpulan, rekomendasi dan implikasi. Pada bab lima ini penulis memberikan simpulan, dan memberikan rekomendasi kepada bagian instansi terkait. Hal ini dimaksudkan agar penelitian memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait khususnya bagi penulis selanjutnya.